

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah daerah diberikan wewenang yang seluas-luasnya dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Adanya peraturan tersebut akhirnya memotivasi berbagai daerah di Indonesia dalam meningkatkan kualitas daerahnya agar memiliki daya saing yang kuat dengan daerah lainnya bahkan dengan negara lain sekalipun. Tidak dipungkiri bahwa pada era globalisasi ini, setiap negara saling bersaing dalam segala aspek dari mulai pendidikan, politik, hukum, sosial-budaya hingga ekonomi. Globalisasi menuntut setiap negara untuk dapat maju dan menyesuaikan dengan kondisi yang semakin modern dan canggih.

Sumber daya melimpah yang dimiliki oleh Indonesia semestinya diasah dan dikelola dengan baik agar menciptakan negara yang makmur dan sejahtera. Pada zaman ini, negara yang maju baik dari segi ekonomi, sosial, politik, budaya, infrastruktur, pertahanan maupun keamanan didapatkan dari proses pembangunan pada negara berkembang. Tidak ada hal yang didapatkan secara instan apalagi pada pembangunan suatu negara. Pembangunan dalam suatu negara tentu akan mengorbankan banyak hal agar mencapai cita-citanya yakni dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa salah satu cita-cita negara adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai cita-cita tersebut, diperlukan salah satunya kompetensi kecerdasan kewargaan sebagai jati diri warga negara dalam melibatkan relasi sosial (*public self*). Manusia sebagai makhluk sosial tentu harus peduli dan dapat berpartisipasi aktif terhadap lingkungan sosialnya sebagai bagian dari suatu budaya dan bangsa. Kecerdasan kewargaan menjadi hal yang wajib dikuasai di abad ke-21

yang semakin modern termasuk oleh warga negara Indonesia yang memiliki beragam suku bangsa, bahasa, kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan dan lapisan sosial. Indonesia sebagai bagian dari dunia hendaknya turut terlibat dalam perkembangan dan perubahan global. Masyarakat haruslah memiliki kemampuan untuk menerima dan beradaptasi serta bijaksana atas mutlaknya keberagaman tersebut.

Budimansyah (2021) mengungkapkan bahwa untuk tumbuh subur nya kecerdasan kewargaan, perlu diciptakan iklim kebebasan berbicara, berkumpul, dan mengembangkan diri. Demokrasi prosedural yang berhenti sebatas ritual pemilihan umum dengan hanya mengganti peraturan dan desain kelembagaan politik tidak memiliki signifikansi bagi kecerdasan dan kreativitas kewarganegaraan. Faktanya berdasarkan survei *Global Innovation Index* (Global Innovation Index, 2020) pada rentang tahun 2018-2020, nilai kreativitas masyarakat Indonesia berada pada ke-85 secara 3 tahun berturut-turut. Data ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kemampuan berpikir inovatif yang tergolong sangat rendah. Sedangkan dalam kecerdasan kewargaan, diperlukan relasi sosial diatas keberagaman yang ada sebagai upaya mengasah kreativitas warga negara untuk menciptakan sebuah inovasi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.

INDONESIA

85th Indonesia ranks 85th among the 131 economies featured in the GII 2020.

The Global Innovation Index (GI) ranks world economies according to their innovation capabilities. Consisting of roughly 80 indicators, grouped into innovation inputs and outputs, the GI aims to capture the multi-dimensional facets of innovation.

The following table shows the rankings of Indonesia over the past three years, noting that data availability and changes to the GI model framework influence year-on-year comparisons of the GI rankings. The statistical confidence interval for the ranking of Indonesia in the GI 2020 is between ranks 78 and 86.

Rankings of Indonesia (2018–2020)

	GI	Innovation inputs	Innovation outputs
2020	85	91	76
2019	85	87	78
2018	85	90	73

- Indonesia performs better in innovation outputs than innovation inputs in 2020.
- This year Indonesia ranks 91st in Innovation Inputs, lower than last year and lower compared to 2018.
- As for innovation outputs, Indonesia ranks 76th. This position is higher than last year and lower compared to 2018.

Gambar 1. 1 - Peringkat Indonesia dalam GII

Sumber: Global Innovation Index

Menurut Sugiarto (2018), gelombang revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan fundamental pada berbagai tatanan kehidupan yang ditandai dengan semakin berkembangnya kreativitas dan inovasi dengan pemanfaatan teknologi informasi yang mendisrupsi berbagai sendi kehidupan global, termasuk persaingan dalam bidang ekonomi. Konsep ekonomi kewarganegaraan (*economy civic*) erat kaitannya dengan revolusi industri 4.0 yang menggambarkan globalisasi dan menekankan pada upaya warga negara dalam memberikan kontribusinya terhadap usaha ekonomi pada berbagai aktivitas perdagangan. Menurut Danial (2020), bantuan teknologi komunikasi informasi semakin memberikan kesempatan bagi para pebisnis yang kreatif untuk berkolaborasi, berkomunikasi membuka peluang pasar, dan meningkatkan jumlah pelanggan. Berdasarkan pemikiran tersebut, *economy civic* dapat dipraktikkan pada komunitas sosial dalam membangun dan menjamin kebersamaan yang berkaitan pula dengan kecerdasan kewargaan, dimana warga negara yang kreatif dapat berperan penting sebagai alat untuk membangun pemerintah.

Dalam membangun suatu pemerintahan, diperlukan ekonomi yang stabil salah satunya melalui kontribusi warga negara yang kreatif. Sedangkan Indonesia sebagai negara yang berkembang sejak kemerdekaannya masih menghadapi persoalan kemiskinan yang tak kunjung selesai, bahkan hingga saat ini data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2021 sebesar 27, 54 juta orang. Jumlah tersebut meningkat 1,12 juta orang terhitung sejak bulan Maret 2020. Namun dapat dikatakan bahwa jumlah tersebut tidak seimbang dengan keseluruhan jumlah penduduk Indonesia per Juni 2021 yang berjumlah 272.229.372 jiwa, serta tidak proporsional dengan keseluruhan jumlah penduduk tersebut. Data BPS tersebut mengisyaratkan bahwa tingkat kemiskinan yang masih tinggi belum mencerminkan Indonesia sebagai negara yang sejahtera (*welfare state*).



Gambar 1. 2 - Profil Kemiskinan di Indonesia Tahun 2021

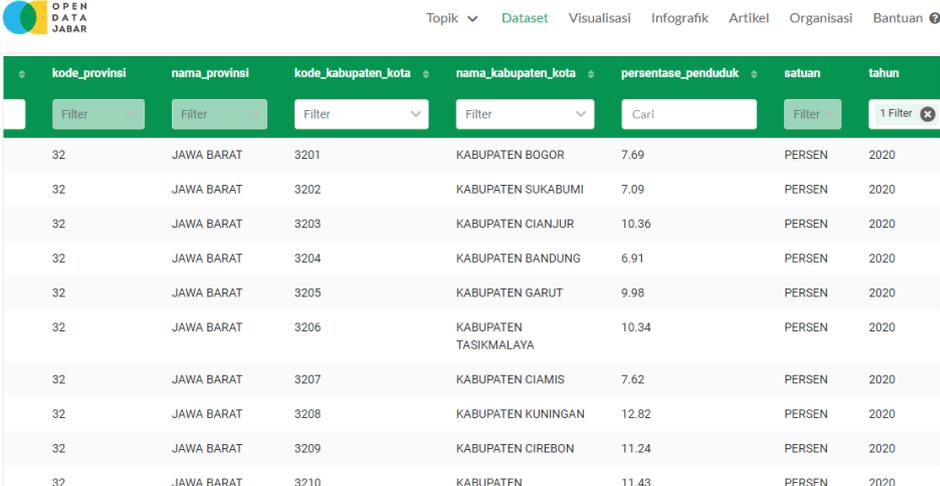
Sumber: Badan Pusat Statistik

Menurut Sukmana (2016, hlm. 104), konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) didefinisikan sebagai suatu negara dimana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya. Adapun menurut Rahmat & Bestari (2014), kemiskinan dapat menjadi sebuah indikasi untuk kesejahteraan masyarakat baik itu lahir maupun batin dilihat dari penghidupan yang layak, aman, dan damai. Kedua konsep tersebut sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia mengharapkan kehidupan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan melihat dari berbagai kondisi yang ada, Indonesia masih jauh dari kategori negara kesejahteraan karena belum bisa membangun warga negara kreatif sebagai upaya menekan angka kemiskinan dalam rangka membangun negara.

Melihat dari berbagai permasalahan yang ada, dibutuhkan suatu pembangunan yang dimulai dari pemerintahan daerah sebagai unit tersempit. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 1 ayat (8) “Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, daya saing, maupun peningkatan

indeks pembangunan manusia”. Artinya pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban dalam membangun daerahnya agar dapat mewujudkan negara yang makmur, sehingga hal tersebut menjadi suatu urgensi bagi pemerintah daerah dalam membangun warga negara kreatif melalui program-program yang dicanangkan.

Salah satu daerah yakni tepatnya Kabupaten Bandung merilis data melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung pada tahun 2019 bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung sebesar 72,41 poin yang mana lebih tinggi jika dibandingkan dengan IPM Kabupaten Bandung sebelumnya pada tahun 2018 yakni sebesar 71,75 poin dan IPM Provinsi Jawa Barat sebesar 72,03 poin. Sedangkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bandung lebih rendah dibandingkan kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Barat yakni sebesar 6,91%. Kemudian menurut Dadang Supriatna (dalam Retno, 2022), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bandung 2021 tercatat 3,56% mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 yang tercatat -1,80%.



kode_provinsi	nama_provinsi	kode_kabupaten_kota	nama_kabupaten_kota	persentase_penduduk	satuan	tahun
32	JAWA BARAT	3201	KABUPATEN BOGOR	7.69	PERSEN	2020
32	JAWA BARAT	3202	KABUPATEN SUKABUMI	7.09	PERSEN	2020
32	JAWA BARAT	3203	KABUPATEN CIANJUR	10.36	PERSEN	2020
32	JAWA BARAT	3204	KABUPATEN BANDUNG	6.91	PERSEN	2020
32	JAWA BARAT	3205	KABUPATEN GARUT	9.98	PERSEN	2020
32	JAWA BARAT	3206	KABUPATEN TASIKMALAYA	10.34	PERSEN	2020
32	JAWA BARAT	3207	KABUPATEN CIAMIS	7.62	PERSEN	2020
32	JAWA BARAT	3208	KABUPATEN KUNINGAN	12.82	PERSEN	2020
32	JAWA BARAT	3209	KABUPATEN CIREBON	11.24	PERSEN	2020
32	JAWA BARAT	3210	KABUPATEN	11.43	PERSEN	2020

Gambar 1.3 - Persentase Penduduk Miskin

Sumber: Badan Pusat Statistik

Capaian pada data tersebut tidak terlepas dari inovasi program yang dicanangkan oleh Bupati Kabupaten Bandung Dadang Naser untuk percepatan pencapaian pembangunan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan serta meningkatkan perencanaan tematik menuju terwujudnya kabupaten yang maju, mandiri dan berdaya saing. Program tersebut dinamakan dengan “Sabilulungan Bandung Seribu Kampung” yang dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, Bupati Kabupaten Bandung tahun 2019. Program tersebut memiliki 6 (enam) kategori kampung tematik diantaranya: 1) Kampung Agro; 2) Kampung *Home Industry*; 3) Kampung Kuliner; 4) Kampung Panorama; 5) Kampung Seni Budaya; dan 6) Kampung Jasa atau Edukasi.

Menurut Zulfikar & Witartih (2020), program “Sabilulungan Bandung Seribu Kampung” di Kabupaten Bandung ini hanya “*tagline*” yang secara harfiah tidak berjumlah seribu kampung, melainkan hanya sekitar 41 kampung dan baru terealisasi sekitar 10 kampung. Kampung-kampung tersebut terdiri dari Kampung Gamis Soreang, Kampung Jeans Kutawaringin, Kampung Lauk Ibum, Kampung Kopi Pangalengan, Kampung Hijab Cicalengka, Kampung Pandai Besi Pasirjambu, Kampung Koi Rancabali, Kampung Agrowisata Pangalengan, Kampung Samara Sangkanhurip, dan Kampung Boneka Sayati. Kampung yang dikembangkan tersebut rata-rata sudah menjalani usahanya sejak puluhan tahun silam kemudian diresmikan penamaannya oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dengan tujuandapat menarik pariwisata dengan *branding* seribu kampung yang menarik. Adapundata yang diperoleh di Kampung Boneka Sayati adalah sebagai berikut.

Tabel 1. 2 - Data Penjualan Pengrajin Boneka di Kampung Boneka Sayati Tahun 2018

No.	Nama	Volume Penjualan (Unit)		
		Juni	Juli	Agustus
1.	Elsa Collection	20	30	20
2.	Zihan Collection	20	35	20
3.	Grosir Boneka	25	40	30
4.	Story Dolls	30	30	25
5.	Toko Naya	20	30	25

Berdasarkan pada tabel di atas, terlihat pada bulan Juli penjualan boneka lebih tinggi dari pada bulan sebelumnya hal tersebut diutarakan oleh pengusaha bahwa bulan Juli penjualan tinggi dikarenakan adanya liburan sekolah dan libur hari raya

Idul Fitri. Sedangkan pada bulan Agustus penjualan mengalami penurunan terindikasi sudah berlalunya libur dan telah kembalinya aktivitas sekolah bagi anak-anak.

Lebih lanjut Zulfikar dan Witartih menjelaskan bahwa pada Musyawarah Rencana Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2018, merupakan wadah terciptanya program ini yakni program “Sabilulungan Bandung Seribu Kampung”. Setelah terciptanya program ini kemudian Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bandung menggelar konsultasi publik dalam upaya realisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung 2019. Konsultasi publik tersebut diikuti perwakilan dari Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKPD), dinas serta semua *stake holder* terkait hingga melibatkan semua komponen masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media massa, perguruan tinggi, petani, pengusaha serta tokoh-tokoh yang mewakili masyarakat Kabupaten Bandung hingga mencapai kesepakatan untuk merealisasikan program “Sabilulungan Bandung Seribu Kampung”.

Maka dengan berlatar belakang dari kondisi perekonomian negara yang semakin menurun dan adanya era globalisasi yang berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, serta perlu dilihatnya program “Sabilulungan Bandung Seribu Kampung” yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai hal tersebut. Hal tersebut untuk melihat apakah program “Sabilulungan Bandung Seribu Kampung” telah sepenuhnya efektif bagi mengatasi permasalahan kemiskinan di Kabupaten Bandung serta mengasah kreatifitas masyarakat terkait sebagai alat untuk membangun negara. Jika hal ini tidak diteliti maka tidak adanya *monitoring* dan evaluasi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung khususnya dari masyarakat daerah yang menjadi sasaran program “Sabilulungan Bandung Seribu Kampung” sebagai pelaku utama dari program tersebut. Namun dengan adanya penelitian ini, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terdapat pada program “Sabilulungan Bandung Seribu Kampung”.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Penelitian ini memiliki masalah penelitian yang umum, mengenai bagaimana Program “Sabilulungan Bandung Seribu Kampung” ini dapat meningkatkan kepedulian masyarakat di Kabupaten Bandung yang terlibat dalam program tersebut. Agar penelitian ini mampu terfokus pada inti masalah umum, peneliti merumuskan permasalahan melalui pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa yang melandasi pelaksanaan Program “Sabilulungan Bandung Seribu Kampung” disebut sebagai program yang mewujudkan kabupaten maju, mandiri dan berdaya saing?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan Program “Sabilulungan Bandung Seribu Kampung” sebagai upaya mengatasi kemiskinan ditinjau dari *economy civic*?
3. Bagaimana manfaat Program “Sabilulungan Bandung Seribu Kampung” dalam mengasah kreativitas warga negara?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan umum yaitu untuk mengetahui efektivitas Program “Sabilulungan Bandung Seribu Kampung” dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perekonomian. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah mengetahui dan memahami rincian sebagai berikut:

1. Ingin mendeskripsikan pelaksanaan Program “Sabilulungan Bandung Seribu Kampung” sebagai program yang mewujudkan kabupaten maju, mandiri dan berdaya saing
2. Ingin menggambarkan mekanisme pelaksanaan Program “Sabilulungan Bandung Seribu Kampung” sebagai upaya mengatasi kemiskinan ditinjau dari *economy civic*
3. Ingin mengkaji manfaat Program “Sabilulungan Bandung Seribu Kampung” dalam mengasah kreativitas warga negara

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian pada hakikatnya dapat diperoleh setelah melakukan penelitian, maka dari itu penelitian ini memiliki kegunaan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat dari Segi Teori

Penelitian yang baik adalah tidak hanya yang bermanfaat untuk peneliti saja melainkan juga dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Maka dengan adanya penelitian ini, manfaat teoritisnya yakni diharapkan dapat memperkaya keilmuan sosial masyarakat, khususnya memberikan informasi mengenai arti penting kreativitas dalam mengembangkan *economy civic* dan kesejahteraan ekonomi. Adapun manfaat lain penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya sehingga dapat menjadi bagian dari perkembangan rumpun ilmu sosial.

2. Manfaat dari Segi Kebijakan

Dari segi kebijakan, penelitian ini memiliki manfaat yakni dalam rangka melaksanakan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, yang mana pemerintah daerah berkewajiban dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan pembangunan daerah agar dapat mewujudkan negara yang makmur.

3. Manfaat dari Segi Praktik

a. Manfaat bagi Peneliti

Manfaat penelitian bagi peneliti salah satunya dapat meningkatkan rasa kepedulian terhadap negara khususnya dalam bidang perekonomian, peneliti sadar bahwa penelitian ini sebagai salah satu upaya pemberian kesadaran bagi peneliti untuk dapat lebih tanggap dan kreatif terhadap perekonomian negara.

b. Manfaat bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini membantu lembaga khususnya lembaga pemerintah Kabupaten Bandung dalam mengevaluasi program yang dicanangkan yakni Program “Sabilulungan Bandung Seribu Kampung”.

c. Manfaat bagi Akademisi

Bagi guru, dosen, maupun yang lainnya manfaat penelitian ini membantu tenaga pendidik khususnya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pendidikan, di luar pelaksanaan pembelajaran di kelas.

4. Manfaat dari Segi Isu serta Aksi Sosial

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan *social project* di masyarakat, institusi pemerintah daerah dan lainnya untuk menumbuhkan jiwa kreatif warga negara dalam memajukan kesejahteraan ekonomi di daerahnya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menginspirasi dan menghimpun para relawan yang tertarik untuk berkontribusi dalam meningkatkan kreativitas warga negara dalam memajukan kesejahteraan ekonomi di daerahnya.

1.5. Struktur Organisasi Skripsi

Dalam menyusun penelitian yang sistematis, dengan berdasar pada Peraturan Rektor Indonesia Nomor 7867/UN40/HK/2019 Tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI Tahun 2019, maka penulis menyusunnya ke dalam struktur organisasi skripsi. Adapun dalam penyusunan skripsi ini terdapat penyesuaian yang meliputi judul, pengesahan, pernyataan bebas plagiarisme, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Sedangkan pada bagian isi dari karya ilmiah berbentuk skripsi ini yaitu:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan diantaranya berisi tentang latar belakang pentingnya Program “Sabilulungan Bandung 1000 Kampung” dalam membina warga negara kreatif serta mengatasi kemiskinan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni landasan program, mekanisme pelaksanaan program, dan manfaat program. Kemudian tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan dan menggambarkan pelaksanaan program serta mengkaji manfaat program. Selain itu dalam bab ini terdapat manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi yang menjadi sistematika penyusunan skripsi.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang konsep-konsep, teori-teori utama dan pendapat para ahli yang terkait dengan fokus permasalahan penelitian. Kemudian penelitian terdahulu yang relevan dan posisi teoritis peneliti berkenaan dengan masalah yang diteliti serta kerangka berfikir penelitian. Adapun konsep-konsep yang dijelaskan dalam bab ini yakni tinjauan pembangunan daerah, Program “Sabilulungan Bandung 1000 Kampung”, *Economy Civic*, dan warga negara kreatif.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang desain penelitian yang akan digunakan yakni pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Kemudian rincian mengenai partisipan dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, prosedur penelitian, teknik analisis data, serta pengujian keabsahan data dan jadwal penelitian.

4. BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti menjelaskan terkait gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi sejarah, visi dan misi, serta struktur organisasi. Kemudian peneliti menjelaskan hasil temuan penelitian yang didapatkan melalui wawancara, observasi, kuesioner, dan studi dokumentasi yang kemudian dianalisis pada bagian pembahasan dan dikaitkan dengan teori-teori yang relevan.

5. BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Pada bab ini berisi mengenai hasil simpulan penelitian kemudian dilanjutkan dengan implikasi penelitian. Selain itu, peneliti memberikan rekomendasi bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian agar dapat mengembangkan topik yang diteliti.